

Bab 3

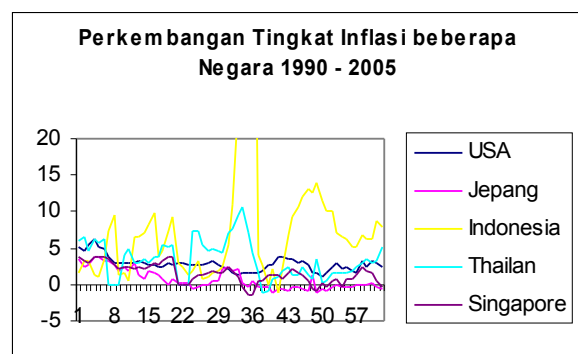
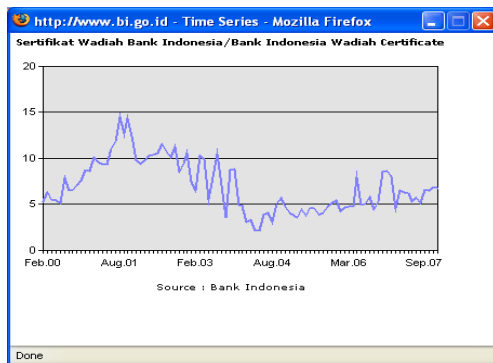
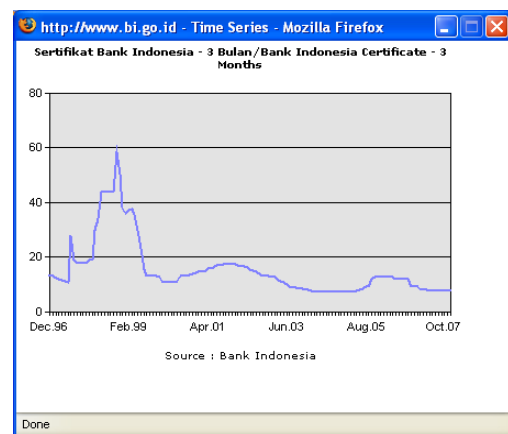
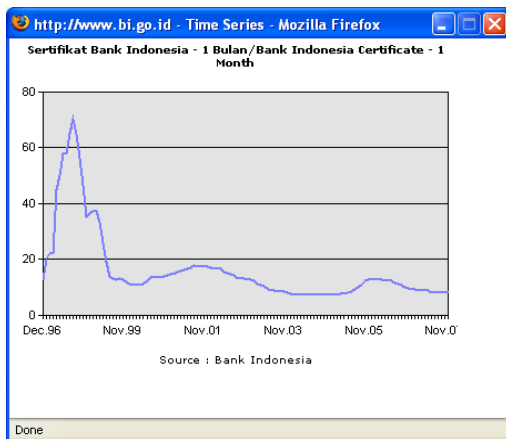
Bank Indonesia (Bank Sentral)

Sumber : www.bi.go.id, dan sumber-sumber lainnya

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan **dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter** secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Contoh beberapa hasil dari kebijakan Bank Indonesia



Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia berwenang:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - penetapan tingkat diskonto;
 - penetapan cadangan wajib minimum;
 - pengaturan kredit atau pembiayaan

Operasi Pasar Terbuka

Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga uang yang beredar akan bertambah.

Penetapan Bunga Diskonto

Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan bertambah.

Penetapan Cadangan Wajib Minimum

Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank umum dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga akan meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan bertambah.

STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

DEWAN GUBERNUR

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas :

- seorang Gubernur sebagai pemimpin,
- dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan
- sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur.

Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

MISI BANK INDONESIA

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

VISI BANK INDONESIA

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya(kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

NILAI NILAI STRATEGIS

Kompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas - Kebersamaan (**KITA – Kompak**)

SASARAN STRATEGIS BANK INDONESIA

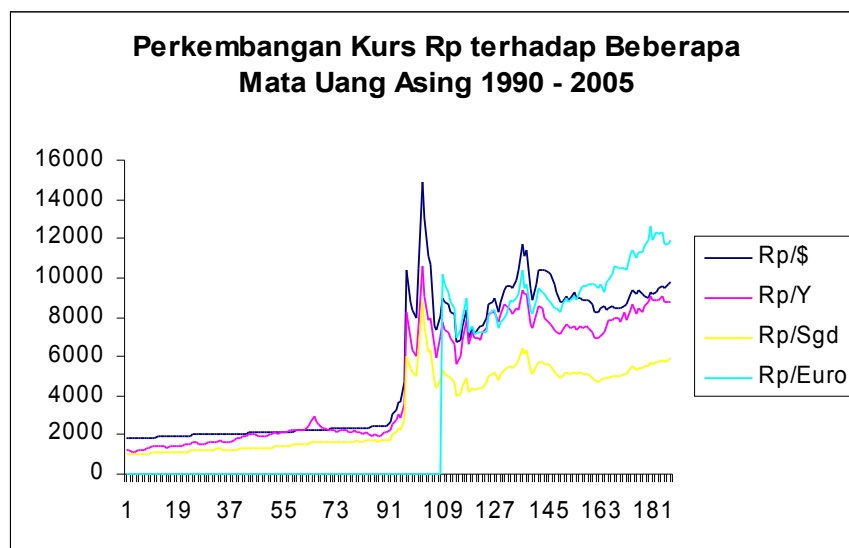
Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Memelihara Kestabilan Moneter;
2. Memelihara Kondisi Keuangan Bank Indonesia yang Sehat dan Akuntabel;
3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Moneter;
4. Meningkatkan Sistem Perbankan yang Sehat dan Efektif serta Sistem Keuangan yang Stabil;
5. Memelihara Keamanan, Keandalan, dan Efisiensi Sistem Pembayaran;
6. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Good Governance;
7. Memperkuat Institusi Bank Indonesia melalui Penciptaan Sinergi antara SDM, Informasi Pengetahuan, dan Rancangan Organisasi dengan Strategi Bank Indonesia.
8. Mengarahkan dan Memantau Efektivitas Perubahan Strategis Bank Indonesia

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, **yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah**. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.



Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. **Ketiga bidang tugas ini adalah :**

- ***menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,***
- ***mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta***
- ***mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.***

Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia :

- menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank,
- melaksanakan pengawasan atas bank, dan
- mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan :

- izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
- memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta
- memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun 1998, maka Bank Indonesia pada tanggal **9 Januari 2004** telah meluncurkan API sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.

Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan buku putih Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam buku putih tersebut.

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dalam mengimplementasikan API selama dua tahun terakhir, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan program-program kegiatan yang tercantum dalam API.

Penyempurnaan program-program kegiatan API tersebut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional.

Penyempurnaan terhadap program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM ke depan sehingga API diharapkan memiliki program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah, serta pengembangan UMKM.



Lampiran

Last update 2 August 2007)

Daftar Bank Sentral di Dunia

Afghanistan:	<u>Bank of Afghanistan</u>
Albania:	<u>Bank of Albania</u>
Algeria:	<u>Bank of Algeria</u>
Argentina:	<u>Central Bank of Argentina</u>
Armenia:	<u>Central Bank of Armenia</u>
Aruba:	<u>Central Bank of Aruba</u>
Australia:	<u>Reserve Bank of Australia</u>
Austria:	<u>Austrian National Bank</u>
Azerbaijan:	<u>National Bank of Azerbaijan</u>
Bahamas:	<u>Central Bank of The Bahamas</u>
Bahrain:	<u>Central Bank of Bahrain</u>
Bangladesh:	<u>Bangladesh Bank</u>
Barbados:	<u>Central Bank of Barbados</u>
Belarus:	<u>National Bank of the Republic of Belarus</u>
Belgium:	<u>National Bank of Belgium</u>
Belize:	<u>Central Bank of Belize</u>
Benin:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Bermuda:	<u>Bermuda Monetary Authority</u>
Bhutan:	<u>Royal Monetary Authority of Bhutan</u>
Bolivia:	<u>Central Bank of Bolivia</u>
Bosnia:	<u>Central Bank of Bosnia and Herzegovina</u>
Botswana:	<u>Bank of Botswana</u>
Brazil:	<u>Central Bank of Brazil</u>
Bulgaria:	<u>Bulgarian National Bank</u>
Burkina Faso:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Cambodia:	<u>National Bank of Cambodia</u>
Cameroon:	<u>Bank of Central African States</u>
Canada:	<u>Bank of Canada - Banque du Canada</u>
Cayman Islands:	<u>Cayman Islands Monetary Authority</u>
Central African Republic:	<u>Bank of Central African States</u>
Chad:	<u>Bank of Central African States</u>
Chile:	<u>Central Bank of Chile</u>
China:	<u>The People's Bank of China</u>
Colombia:	<u>Bank of the Republic</u>
Comoros:	<u>Central Bank of Comoros</u>
Congo:	<u>Bank of Central African States</u>
Costa Rica:	<u>Central Bank of Costa Rica</u>
Côte d'Ivoire:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Croatia:	<u>Croatian National Bank</u>
Cuba:	<u>Central Bank of Cuba</u>
Cyprus:	<u>Central Bank of Cyprus</u>
Czech Republic:	<u>Czech National Bank</u>
Denmark:	<u>National Bank of Denmark</u>
Dominican Republic:	<u>Central Bank of the Dominican Republic</u>
East Caribbean area:	<u>Eastern Caribbean Central Bank</u>
Ecuador:	<u>Central Bank of Ecuador</u>

Egypt:	<u>Central Bank of Egypt</u>
El Salvador:	<u>Central Reserve Bank of El Salvador</u>
Equatorial Guinea:	<u>Bank of Central African States</u>
Estonia:	<u>Bank of Estonia</u>
Ethiopia:	<u>National Bank of Ethiopia</u>
European Union:	<u>European Central Bank</u>
Fiji:	<u>Reserve Bank of Fiji</u>
Finland:	<u>Bank of Finland</u>
France:	<u>Bank of France</u>
Gabon:	<u>Bank of Central African States</u>
The Gambia:	<u>Central Bank of The Gambia</u>
Georgia:	<u>National Bank of Georgia</u>
Germany:	<u>Deutsche Bundesbank</u>
Ghana:	<u>Bank of Ghana</u>
Greece:	<u>Bank of Greece</u>
Guatemala:	<u>Bank of Guatemala</u>
Guinea Bissau:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Guyana:	<u>Bank of Guyana</u>
Haiti:	<u>Central Bank of Haiti</u>
Honduras:	<u>Central Bank of Honduras</u>
Hong Kong:	<u>Hong Kong Monetary Authority</u>
Hungary:	<u>Magyar Nemzeti Bank</u>
Iceland:	<u>Central Bank of Iceland</u>
India:	<u>Reserve Bank of India</u>
Indonesia:	<u>Bank Indonesia</u>
Iran:	<u>The Central Bank of the Islamic Republic of Iran</u>
Iraq:	<u>Central Bank of Iraq</u>
Ireland:	<u>Central Bank and Financial Services Authority of Ireland</u>
Israel:	<u>Bank of Israel</u>
Italy:	<u>Bank of Italy</u>
Jamaica:	<u>Bank of Jamaica</u>
Japan:	<u>Bank of Japan</u>
Jordan:	<u>Central Bank of Jordan</u>
Kazakhstan:	<u>National Bank of Kazakhstan</u>
Kenya:	<u>Central Bank of Kenya</u>
Korea:	<u>Bank of Korea</u>
Kuwait:	<u>Central Bank of Kuwait</u>
Kyrgyzstan:	<u>National Bank of the Kyrgyz Republic</u>
Latvia:	<u>Bank of Latvia</u>
Lebanon:	<u>Central Bank of Lebanon</u>
Lesotho:	<u>Central Bank of Lesotho</u>
Libya:	<u>Central Bank of Libya</u>
Lithuania:	<u>Bank of Lithuania</u>
Luxembourg:	<u>Central Bank of Luxembourg</u>
Macao:	<u>Monetary Authority of Macao</u>
Macedonia:	<u>National Bank of the Republic of Macedonia</u>
Madagascar:	<u>Central Bank of Madagascar</u>
Malaysia:	<u>Central Bank of Malaysia</u>
Malawi:	<u>Reserve Bank of Malawi</u>
Mali:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>

Malta:	<u>Central Bank of Malta</u>
Mauritius:	<u>Bank of Mauritius</u>
Mexico:	<u>Bank of Mexico</u>
Moldova:	<u>National Bank of Moldova</u>
Mongolia:	<u>Bank of Mongolia</u>
Morocco:	<u>Bank of Morocco</u>
Mozambique:	<u>Bank of Mozambique</u>
Namibia:	<u>Bank of Namibia</u>
Nepal:	<u>Central Bank of Nepal</u>
Netherlands:	<u>Netherlands Bank</u>
Netherlands Antilles:	<u>Bank of the Netherlands Antilles</u>
New Zealand:	<u>Reserve Bank of New Zealand</u>
Nicaragua:	<u>Central Bank of Nicaragua</u>
Niger:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Nigeria:	<u>Central Bank of Nigeria</u>
Norway:	<u>Central Bank of Norway</u>
Oman:	<u>Central Bank of Oman</u>
Pakistan:	<u>State Bank of Pakistan</u>
Papua New Guinea:	<u>Bank of Papua New Guinea</u>
Paraguay:	<u>Central Bank of Paraguay</u>
Peru:	<u>Central Reserve Bank of Peru</u>
Philippines:	<u>Bangko Sentral ng Pilipinas</u>
Poland:	<u>National Bank of Poland</u>
Portugal:	<u>Bank of Portugal</u>
Qatar:	<u>Qatar Central Bank</u>
Romania:	<u>National Bank of Romania</u>
Russia:	<u>Central Bank of Russia</u>
Rwanda:	<u>National Bank of Rwanda</u>
San Marino:	<u>Central Bank of the Republic of San Marino</u>
Samoa:	<u>Central Bank of Samoa</u>
Saudi Arabia:	<u>Saudi Arabian Monetary Agency</u>
Senegal:	<u>Central Bank of West African States (BCEAO)</u>
Serbia:	<u>National Bank of Serbia</u>
Seychelles:	<u>Central Bank of Seychelles</u>
Sierra Leone:	<u>Bank of Sierra Leone</u>
Singapore:	<u>Monetary Authority of Singapore</u>
Slovakia:	<u>National Bank of Slovakia</u>
Slovenia:	<u>Bank of Slovenia</u>
Solomon Islands:	<u>Central Bank of Solomon Islands</u>
South Africa:	<u>South African Reserve Bank</u>
Spain:	<u>Bank of Spain</u>
Sri Lanka:	<u>Central Bank of Sri Lanka</u>
Sudan:	<u>Bank of Sudan</u>
Surinam:	<u>Central Bank of Suriname</u>
Swaziland:	<u>The Central Bank of Swaziland</u>
Sweden:	<u>Sveriges Riksbank</u>
Switzerland:	<u>Swiss National Bank</u>
Tajikistan:	<u>National Bank of the Republic of Tajikistan</u>
Tanzania:	<u>Bank of Tanzania</u>
Thailand:	<u>Bank of Thailand</u>

Togo: [Central Bank of West African States \(BCEAO\)](#)
Tonga: [National Reserve Bank of Tonga](#)
Trinidad and Tobago: [Central Bank of Trinidad and Tobago](#)
Tunisia: [Central Bank of Tunisia](#)
Turkey: [Central Bank of the Republic of Turkey](#)
Uganda: [Bank of Uganda](#)
Ukraine: [National Bank of Ukraine](#)
United Arab Emirates: [Central Bank of United Arab Emirates](#)
United Kingdom: [Bank of England](#)
United States: [Board of Governors of the Federal Reserve System \(Washington\)](#)
[Federal Reserve Bank of New York](#)
Uruguay: [Central Bank of Uruguay](#)
Vanuatu: [Reserve Bank of Vanuatu](#)
Venezuela: [Central Bank of Venezuela](#)
Yemen: [Central Bank of Yemen](#)
Zambia: [Bank of Zambia](#)
Zimbabwe: [Reserve Bank of Zimbabwe](#)

Sumber : <http://www.bis.org/cbanks.htm>
70145473

Nilai Pinjaman dan Penggalangan Dana Oleh Perbankan Dunia (Asia-Pasific)
Sumber : <http://www.bis.org/cbanks.htm>

Table 7A (cont.)

Vis-à-vis countries	Amounts outstanding				Estimated exchange rate adjusted changes					
	Dec 2005	Dec 2006	Mar 2007	Jun 2007	2005	2006	Q3 2006	Q4 2006	Q1 2007	Q2 2007
Loans										
ii) Asia & Pacific	384,697	458,879	499,939	545,751	36,106	64,446	36,320	-12,073	39,535	46,478
Afghanistan	42	40	91	104	22	-5	14	-14	50	12
Armenia	65	105	114	106	46	34	12	4	8	-9
Azerbaijan	810	1,188	1,176	1,372	284	345	-45	201	-17	190
Bangladesh	1,299	2,020	1,561	1,758	358	669	-145	909	-461	195
Bhutan	45	59	60	63	12	9	3	1	-	2
British Overseas Territories	189	1,465	1,659	232	-1,025	1,267	-20	29	194	-1,429
Brunei	494	559	1,028	738	124	45	-72	-45	464	-293
Cambodia	55	99	126	122	16	42	-	5	27	-4
China	90,165	100,835	112,672	122,195	12,545	8,649	1,326	-4,049	11,606	9,510
Fiji	71	99	112	122	16	22	18	-9	11	6
French Polynesia	1,093	1,274	1,318	1,267	220	44	-17	-164	29	-67
Georgia	159	223	227	224	36	51	48	-77	4	-4
India	43,541	56,959	62,584	72,556	6,997	11,920	2,004	3,649	5,354	10,271
Indonesia	30,224	33,533	34,173	36,097	1,812	2,057	954	1,297	446	2,020
Kazakhstan	5,953	13,334	13,505	14,063	2,621	6,782	701	5,802	143	549
Kiribati	2	11	2	3	1	9	-1	10	-9	1
Kyrgyz Republic	27	29	34	596	-10	1	-15	4	5	562
Laos	99	162	187	188	83	51	35	-3	24	1
Malaysia	25,029	26,746	26,962	30,514	-1,545	1,016	260	-3,164	2,082	1,683
Maldives	198	377	448	564	56	175	69	24	70	116
Marshall Islands	7,092	9,557	10,625	12,581	3,850	2,428	836	607	1,063	1,957
Micronesia	6	1	3	20	-1	-6	-	-	2	17
Mongolia	54	83	78	89	-5	25	-15	23	-5	11
Deposits										
ii) Asia & Pacific	507,705	618,278	644,558	695,125	54,855	98,185	45,068	35,279	25,153	47,386
Afghanistan	777	1,025	1,055	1,134	218	202	-120	154	28	69
Armenia	407	830	702	805	23	394	17	183	-130	97
Azerbaijan	1,638	1,780	2,115	2,408	-140	91	525	-163	334	289
Bangladesh	2,163	4,064	4,302	5,038	-409	1,322	239	214	227	701
Bhutan	71	79	111	151	-	6	-41	-8	32	40
British Overseas Territories	564	1,013	781	1,037	-1,204	410	66	403	-235	248
Brunei	2,708	2,384	3,253	2,910	1,235	-449	-571	-109	856	-354
Cambodia	206	297	342	364	20	88	19	26	45	21
China	134,451	147,892	138,921	139,672	20,962	11,843	9,566	15,101	-9,100	749
Fiji	217	216	190	225	-36	-10	-54	56	-27	32
French Polynesia	815	989	992	1,010	90	52	59	48	-5	8
Georgia	335	588	714	939	8	238	-92	210	122	220
India	57,355	78,234	77,317	83,907	12,402	17,137	3,227	6,405	-1,075	6,093
Indonesia	12,999	12,187	12,267	12,941	3,021	-1,024	-574	755	57	658
Kazakhstan	4,609	5,368	8,786	6,548	2,115	-25	1,151	-748	3,403	-2,247
Kiribati	142	127	162	126	137	-29	4	23	35	-40
Kyrgyz Republic	220	274	224	245	68	47	45	64	-51	20
Laos	111	667	786	1,124	45	453	189	-6	119	338
Malaysia	18,711	27,973	35,400	40,215	-6,081	8,246	1,454	4,540	7,336	4,651
Maldives	116	128	141	163	19	7	-16	-5	13	21
Marshall Islands	2,210	4,201	5,585	5,389	998	1,911	180	1,289	1,371	-211
Micronesia	5	19	22	11	-3	14	6	-1	3	-11
Mongolia	192	358	492	517	122	159	-176	204	132	23